

ANALISIS PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



JUNI 2025

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

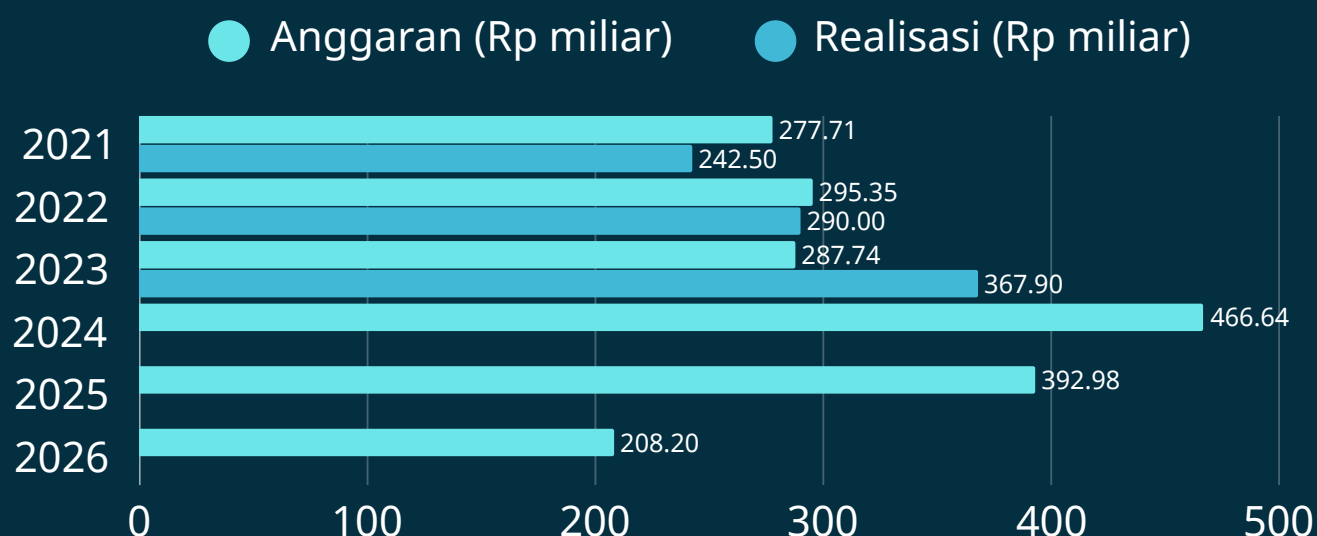
Penulis:

Riza Aditya Syafri, S.Ak., M.E., Satrio Arga Effendi, S.E., M.E.

Daftar Isi

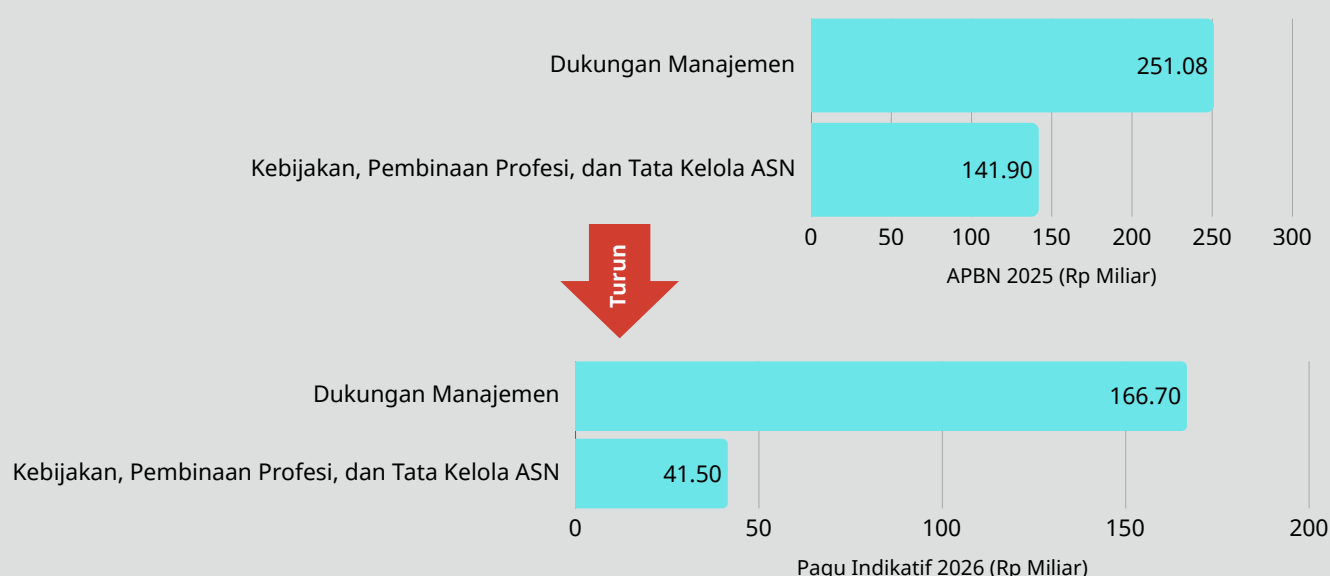
Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2025	03
Output & Outcome Anggaran 2025	05
KemenpanRB dalam PN 07 RPJMN 2025-2029	07
Isu Strategis	18





Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, Nota Keuangan APBN 2025 dan KEM PPKF 2026

Pagu Indikatif 2026



Pagu Indikatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tahun 2026 sebesar Rp208,2 miliar, dengan dua program utama, yakni program dukungan manajemen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp166,7 miliar, dan program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN dengan anggaran sebesar Rp41,5 miliar di tahun 2026.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut turun sebesar 47 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp392,98 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025. Program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN menjadi program dengan penurunan anggaran terbesar di tahun 2026, yakni menurun hingga 70,8 persen dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2025.



Alokasi Anggaran Selama Kurun Waktu 2020–2024 Diarahkan Untuk Berbagai Kebijakan Strategis KemenpanRB

Selama periode 2020 hingga 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) konsisten mengarahkan kebijakan strategisnya pada penguatan kerangka reformasi birokrasi nasional. Fokus utamanya meliputi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyederhanaan birokrasi, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta transformasi manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan-kebijakan ini berjalan seiring dengan arah strategis RPJMN 2020–2024 dan kebutuhan aktual penguatan tata kelola birokrasi di tengah dinamika transformasi digital pemerintahan.

Pada tahun 2020, Kementerian PANRB mulai mengimplementasikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024, dengan titik tekan pada penyederhanaan birokrasi dan jabatan struktural dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan. Salah satu kegiatan kunci pada tahun tersebut adalah evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meskipun masih dihadapkan pada lemahnya keterlibatan pimpinan instansi serta rendahnya integrasi SAKIP ke dalam proses manajerial.

Tahun 2021 menjadi momen akselerasi penerapan sistem SPBE secara nasional. Kementerian PANRB meluncurkan Arsitektur SPBE Nasional, yang menjadi dasar desain digitalisasi tata kelola instansi. Sejalan dengan itu, kebijakan teknis juga diperkuat melalui penerbitan beberapa PermenPANRB, seperti PermenPANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, PermenPANRB No. 89/2021 tentang Penjenjangan Kinerja, dan PermenPANRB No. 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Ketiga regulasi ini menjadi perangkat penting dalam mengukur dan mempercepat transformasi budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih adaptif dan transparan.

Memasuki tahun 2022, Kementerian PANRB mulai memprioritaskan penguatan kapasitas ASN melalui kebijakan manajemen talenta dan pengembangan sistem kerja fleksibel. Hal ini tercermin dalam PermenPANRB No. 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan PermenPANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Pada saat yang sama, evaluasi implementasi SPBE dan SAKIP tetap menjadi fondasi untuk mengukur kemajuan kinerja instansi pemerintah.

Overview Anggaran 2020-2025

HALAMAN 4



Alokasi Anggaran Selama Kurun Waktu 2020-2024 Darahkan Untuk Berbagai Kebijakan Strategis KemenpanRB (Lanjutan)

Tahun 2023 ditandai oleh gelombang besar reformasi kelembagaan dan sistem manajemen ASN. Kementerian PANRB menerbitkan PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional, yang menyederhanakan pengelolaan karir ASN, dan PermenPANRB No. 9/2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Selain itu, evaluasi SPBE juga diperkuat dengan instrumen baru yang diatur dalam PermenPANRB No. 6/2023. Kendati demikian, tantangan utama pada periode ini adalah resistensi perubahan di kalangan ASN, yang belum seluruhnya mampu beradaptasi dengan reformasi struktural dan digitalisasi sistem kerja.

Tahun 2024 menjadi tahun transisi penting, mengingat pelaksanaan Pemilu Serentak dan pergantian pemerintahan berpotensi memengaruhi konsistensi kebijakan. Dalam situasi ini, Kementerian PANRB tetap melanjutkan agenda-reformasi dengan mendorong integrasi pelayanan publik ke dalam platform digital nasional serta penguatan kebijakan kelembagaan. Salah satu terobosan yang signifikan pada tahun ini adalah kebijakan penerimaan ASN dari tenaga non-ASN secara *massal* dan strategi pengisian formasi ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).



Program Dukungan Manajemen Secara Rata-Rata Menjadi Program dengan Alokasi Anggaran Terbesar dengan rata-rata sebesar 68 persen

Alokasi anggaran per program dalam periode 2021-2025 didominasi oleh Program Dukungan Manajemen dengan rata-rata proporsi anggaran sebesar 68% terhadap total alokasi anggaran KemenpanRB setiap tahunnya. Sementara itu, Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN memiliki proporsi anggaran yang berfluktuatif selama tahun 2021-2025, dengan rata-rata proporsi anggaran sebesar 32% terhadap alokasi anggaran total KemenpanRB.



Porsi belanja barang mendominasi jenis belanja lainnya Pada 2021-2025

Berdasarkan jenis belanjanya selama periode 2021-2025, secara rata-rata didominasi oleh belanja barang yakni sebesar 57,2%. Di antara ketiga jenis belanja, alokasi belanja modal cenderung menjadi yang terendah, dengan rata-rata sebesar 9% per tahun selama tahun 2021-2025.

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 5



Target Keluaran/Output 2025

- Rekomendasi Rancangan Kebijakan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 1 Rekomendasi Kebijakan
- Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, 116 Lembaga
- Rekomendasi Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, 1 Rekomendasi Kebijakan
- Rekomendasi Kebijakan Manajemen Talenta dan Karier Pegawai ASN, 1 Rekomendasi Kebijakan
- Rekomendasi Kebijakan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja SDM Aparatur, 1 Rekomendasi Kebijakan
- Evaluasi Indeks Pelayanan Publik, 633 Lembaga
- Peningkatan Penerapan MPP Digital, 20 Pemda
- Penguatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional/ JIPPNAS, 10 Lembaga
- Monitoring dan Penguatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, 25 Lembaga

Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 6



Target Outcome

- Terwujudnya instansi Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel
- Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi
- Terwujudnya ASN yang profesional
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima

KemenpanRB dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.07 Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Indeks Sistem Merit ASN	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.07.01 Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	07.07.02 Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif	01. Terwujudnya sistem manajemen talenta ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	<ul style="list-style-type: none"> 01. Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin Indeks Sistem Merit; 02. Aspek manajemen kinerja Indeks Sistem Merit; dan 03. Persentase instansi pemerintah yang aspek penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja dalam indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" 	<ul style="list-style-type: none"> 01. Aspek perencanaan kebutuhan Indeks Sistem Merit; 02. Aspek pengadaan Indeks Sistem Merit; 03. Persentase instansi pemerintah yang aspek perencanaan kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"; 04. Persentase instansi pemerintah yang aspek pengadaan pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"

**INDKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

- 05. Persentase instansi pemerintah yang aspek manajemen talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"
- 06. Persentase instansi Pemerintah yang aspek standar kompetensi jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"
- 07. Persentase instansi Pemerintah yang aspek standarisasi jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah"

KemenpanRB berkewajiban menjalankan PP 07.07 "Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN" dalam mendukung Prioritas Nasional 07, dengan menjalankan KP 07.07.01 dan KP 07.07.02

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS**

Indeks Sistem Merit ASN pada tahun 2029 mencapai 0,65, dari yang sebelumnya baseline tahun 2024 sebesar 0,54

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**
Target KP 07.07.01

01. Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin Indeks Sistem Merit pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;
02. Aspek manajemen kinerja Indeks Sistem Merit pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;

Target KP 07.07.02

01. Aspek perencanaan kebutuhan Indeks Sistem Merit pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;
02. Aspek pengadaan Indeks Sistem Merit pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;
03. Persentase instansi Pemerintah yang aspek perencanaan kebutuhan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah;

TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS

Target KP 07.07.01

03. Persentase instansi Pemerintah yang aspek penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja dalam indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah

Target KP 07.07.02

04. Persentase instansi Pemerintah yang aspek pengadaan pegawai dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah.

05. Persentase instansi Pemerintah yang aspek manajemen talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah.

06. Persentase instansi Pemerintah yang aspek standar kompetensi jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah.

07. Persentase instansi pemerintah yang aspek standarisasi jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah.

PROYEK PRIORITAS

- 01. Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN;
- 02. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN

- 01. Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Manajemen Talenta ASN;
- 02. Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
- 03. Penerapan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN;
- 04. Penerapan Standarisasi Jabatan dan Standar Kompetensi ASN.

KemenpanRB dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.07 Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Indeks Sistem Merit ASN	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.07.03 Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar	07.07.04 Digitalisasi Manajemen ASN
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terwujudnya penerapan pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas	01. Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang berkualitas
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	<ul style="list-style-type: none"> 01. Aspek pengembangan karier Indeks Sistem Merit; 02. Persentase instansi Pemerintah yang aspek pengembangan kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah". 	<ul style="list-style-type: none"> 01. Aspek sistem informasi Indeks Sistem Merit; 02. Persentase instansi pemerintah yang aspek digitalisasi manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah."

KemenpanRB berkewajiban menjalankan PP 07.07 "Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN" dalam mendukung Prioritas Nasional 07, dengan menjalankan KP 07.07.03 dan KP 07.07.04

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS**

Indeks Sistem Merit ASN pada tahun 2029 mencapai 0,65, dari yang sebelumnya baseline tahun 2024 sebesar 0,54

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

Target KP 07.07.03

01. Aspek pengembangan karier Indeks Sistem Merit pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;
02. Persentase instansi Pemerintah yang aspek pengembangan kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah.

Target KP 07.07.04

01. Aspek sistem informasi Indeks Sistem Merit pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;
02. Persentase instansi Pemerintah yang aspek digitalisasi manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah.

PROYEK PRIORITAS

01. Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Pengembangan Kompetensi;
02. Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN;
03. Pemberian Beasiswa Pendidikan

01. Penguatan Platform Digital Manajemen ASN;
02. Pengembangan dan Pemeliharaan *Backend Services Platform Digital* Manajemen ASN

KemenpanRB dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.07 Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Indeks Sistem Merit ASN	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.07.05 Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN	07.07.06 Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terbangunnya perilaku ASN yang beretika	01. Terwujudnya penerapan dan evaluasi manajemen ASN yang berkualitas
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	<ul style="list-style-type: none"> 01. Indeks BerAKHLAK; 02. Persentase instansi pemerintah yang aspek budaya kerja dan citra institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" 	<ul style="list-style-type: none"> 01. Jumlah instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "baik" 02. Persentase instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "menengah" 03. Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi manajemen ASN yang dimanfaatkan

KemenpanRB berkewajiban menjalankan PP 07.07 "Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN" dalam mendukung Prioritas Nasional 07, dengan menjalankan KP 07.07.05 dan KP 07.07.06

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS**

Indeks Sistem Merit ASN pada tahun 2029 mencapai 0,65, dari yang sebelumnya baseline tahun 2024 sebesar 0,54

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

Target KP 07.07.05

01. Indeks BerAKHLAK pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;
02. Persentase instansi Pemerintah yang aspek budaya kerja dan citra institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah.

Target KP 07.07.06

01. Jumlah instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "baik" pada tahun 2029 ditargetkan mengikuti instrumen Indeks Sistem Merit yang telah dimutakhirkan;
02. Persentase instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "menengah" pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 54 persen dari keseluruhan instansi Pemerintah;
03. Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi manajemen ASN yang dimanfaatkan pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 100 persen

PROYEK PRIORITAS

01. Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Budaya Kerja
02. Peningkatan Integritas dan Budaya Kerja ASN

01. Penerapan Kebijakan Sistem Merit
02. Evaluasi Manajemen ASN

KemenpanRB dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.08 Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Indeks Pelayanan Publik 02. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.08.01 Tata Kelola Pelayanan Publik	07.08.02 Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	01. Terwujudnya kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	<ul style="list-style-type: none"> 01. Indeks Pelayanan Publik K/L 02. Indeks Pelayanan Publik Provinsi 03. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten 04. Indeks Pelayanan Publik Kota 	<ul style="list-style-type: none"> 01. Persentase instansi pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori "B" keatas); 02. Persentase instansi pemerintah (Provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori "B" keatas); 03. Persentase instansi pemerintah (Kab/Kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori "B" keatas)

KemenpanRB berkewajiban menjalankan PP 07.08 "Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan" dalam mendukung Prioritas Nasional 07, dengan menjalankan KP 07.08.01 dan KP 07.08.02

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS**

01. Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 3,80 dari baseline sebelumnya di tahun 2024 sebesar 3,78;
02. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 75, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 64,91.

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

Target KP 07.08.01

01. Indeks Pelayanan Publik K/L pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 4,07, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 4,16.
02. Indeks Pelayanan Publik Provinsi pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 3,8, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 3,91.
03. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 3,62, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 3,63.
04. Indeks Pelayanan Publik Kota pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 4,09, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 4,01.

Target KP 07.08.02

01. Persentase instansi Pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori "B" keatas) pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 100 persen, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 97,62 persen;
02. Persentase instansi Pemerintah (Provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori "B" keatas) pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 100 persen, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 100 persen;
03. Persentase instansi Pemerintah (Kab/Kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori "B" keatas) pada tahun 2029 ditargetkan sebesar 83 persen, dari baseline sebelumnya tahun 2024 sebesar 75,79 persen.

PROYEK PRIORITAS

01. Penguatan Kerangka Regulasi Tata Kelola Pelayanan Publik
02. Penguatan Pelayanan Publik Inklusif dan Terpadu
03. Penguatan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik
04. Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

01. Penguatan Ekosistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
04. Penguatan Tata Kelola Kebijakan Instansi Pemerintah

KemenpanRB dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 7 (PN 07) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.10 Pemerintah Digital	
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien	
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.10.01 Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital	07.10.04 Transofrmasi Digital Layanan Publik Prioritas
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transformatif	01. Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu
INDKATOR KEGIATAN PRIORITAS	<ul style="list-style-type: none"> 01. Jumlah kebijakan pemerintah digital yang ditetapkan 02. Jumlah lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital 	<ul style="list-style-type: none"> 01. Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik

KemenpanRB berkewajiban menjalankan PP 07.10 "Pemerintah Digital" dalam mendukung Prioritas Nasional 07, dengan menjalankan KP 07.10.01 dan KP 07.10.04

**TARGET INDIKATOR
SASARAN PROGRAM
PRIORITAS**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditargetkan sebesar 2,00 pada tahun 2029, dari baseline tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 2,79.

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

Target KP 07.10.01

01. Jumlah kebijakan Pemerintah digital yang ditetapkan pada tahun 2029 ditargetkan sebanyak 0 kebijakan.

02. Jumlah lembaga yang menerapkan arsitektur Pemerintah digital pada tahun 2029 ditargetkan sebanyak 614 lembaga pemerintah yang telah menerapkan arsitektur pemerintah digital.

Target KP 07.10.04

01. Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik hingga tahun 2029 ditargetkan sebanyak 50 layanan.

PROYEK PRIORITAS

01. Kebijakan Pemerintah Digital.
02. Kedaulatan Sistem Pemerintah Digital.
03. Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.
04. Pengembangan Proses Bisnis Tematik dalam Arsitektur Pemerintah Digital.

01. Pengembangan Layanan Publik Prioritas Berbasis Digital.
02. Penguatan Tata Kelola Layanan Perizinan Berusaha.
03. Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan.
04. Transformasi Pelayanan Pertanahan.

Isu Strategis

Transformasi Digital Pemerintahan yang Belum Mendalam

Meskipun SPBE dan *Super Platform* pelayanan publik terus digalakkan, realisasi transformasi digital masih tersendat dalam hal integrasi dan orientasi berbasis dampak. GDRBN 2025–2045 menekankan pergeseran dari sekadar digitalisasi prosedur menuju “*government as a platform*” yang inklusif dan human-centered.

Masih Rendahnya Indeks RB di Tingkat Daerah

Meski secara nasional indeks RB meningkat—masing-masing provinsi rata-rata 74,63, dan kabupaten/kota 69,46 pada 2024. Namun masih terdapat kesenjangan besar antar daerah. Provinsi seperti Jabar, Bali, Sumbar menunjukkan kinerja baik, tetapi masih muncul daerah dengan kemajuan lamban.

Dampak: Kesenjangan ini dapat menurunkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong disparitas kualitas tata kelola antar daerah.

Resistensi terhadap Pendekatan “Anti-Mainstream Bureaucracy”

Kementerian PANRB mencanangkan pendekatan reformasi birokrasi yang inovatif di 2024, namun menghadapi resistensi budaya institusional. **Masalah:** ASN cenderung menjaga “zona nyaman” birokrasi lama, sehingga kolaborasi lintas unit terhambat dan birokrasi tetap lamban serta tidak adaptif.

Ketimpangan Kapasitas ASN terhadap Tantangan Digital dan Fleksibel

Pengisian ASN untuk IKN dan pelaksanaan sistem kerja fleksibel telah dimulai, tetapi kesiapan kompetensi dan budaya kerja digital belum merata. Banyak ASN masih terbiasa pola kerja konvensional dan memerlukan kebijakan insentif dan pelatihan adaptif.

Kelembagaan Pemerintah Kurang Lincah untuk Atasi Krisis dan Lingkungan Baru

Roadmap Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) mencantumkan kebutuhan kelembagaan yang adaptif terhadap krisis (seperti pandemi, perubahan iklim), yang masih terbatas pada level desain.

Masalah: Struktur kelembagaan saat ini masih kebanyakan linier dan kurang responsif, serta belum sepenuhnya mengadopsi kerangka *agile governance*.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)